



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 885/IV/X/2015



**PERLU KERJA LEBIH KERAS
PENUHI TARGET KUNJUNGAN WISATA**



**BANGSA INDONESIA
MASIH PERLU KADER
PAMONG PRAJA**



**KETUA DPR TERIMA
MENKOPOLHUKAM
BAHAS BENCANA
ASAP**

Jangan lewatkan
info DPR terkini
dan live streaming
TV Parlemen di
www.dpr.go.id



PERLU KERJA LEBIH KERAS PENUHI TARGET KUNJUNGAN WISATA



Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyhari saat diwawancara wartawan

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyhari menegaskan, perlu langkah-langkah lebih keras untuk bisa memenuhi target kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara (wisnus) atau wisatawan mancanegara (wisman). Dalam APBN- P 2015 Kemenpar dapat pagu anggaran Rp 2,472 triliun dan RAPBN 2016 mendapatkan alokasi pagu sementara Rp 5,643 triliun berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 3,17 T.

Hal itu dikemukakannya ketika bersama Tim Komisi X DPR menggelar pertemuan dengan Sekda Provinsi Jawa Tengah, jajaran Kementerian Pariwisata, Direksi Taman Wisata Borobudur, ASITA dan PHRI di balai pertemuan Hotel Manohara, Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jateng, baru-baru ini.

Menurut Abdul Kharis, kenaikan anggaran Kemenpar ini diantaranya untuk program promosi pariwisata sehingga target kunjungan wisata sebanyak 10 juta pada 2015 menjadi

12 juta pada 2016. Penerimaan devisa diharapkan meningkat dari Rp 155 T tahun 2015 menjadi 172 T pada tahun 2016. Selain itu, jumlah perjalanan wisnus sebanyak 255 juta tahun 2015 menjadi 260 juta pada tahun 2016.

“Kalau hanya dengan langkah-langkah biasa, target 12 juta wisman tahun 2016 menjadi target sangat berat, betapun DPR akan menyetujui 5,6 T untuk tahun 2016. Diharapkan dengan peningkatan yang cukup spektakuler ini target akan tercapai,” tegasnya.

Politisi PKS ini menambahkan, Komisi X mendorong pada tahun 2016 dikembangkan program destinasi wisata religi. Di Jateng memiliki wisata aneka ragam salah satunya peningkatan situs-situs purbakala seperti Borobudur. Bahkan candi-candi besar sebagian terletak di Jateng dan di daerah ini juga terkenal sejarah peninggalan Islam dan Jawa serta masjid-masjid dan makam-makam raja. Potensi ini hendaknya dimanfaatkan oleh Pemprov. Jateng untuk mengembangkan

wisata religi.

Plh. Dirut PT Taman Wisata Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Purwanto menjelaskan, tahun 2010 jumlah pengunjung sebanyak 3,6 juta orang dan pada tahun 2014 sebanyak 5,1 juta orang terdiri 4,67 juta wisnus dan 448 ribu wisman.

Joko Suratno dari Asita Jateng menyatakan, apa yang diungkap Komisi X sangat strategis, sebab Borobudur terkait kunjungan wisatawan asing butuh promosi lagi karena menurunnya rating Borobudur. Target yang cukup banyak dilakukan Angkor Wat (Kamboja) sampai 8 juta dan Borobudur hanya ratusan ribu.

Selain promosi maka infrastruktur harus dipersiapkan dengan baik, termasuk mempercantik pintu gerbang Bandara Ahmad Yani di Semarang sebagai salah satu pintu masuk wisatawan ke Borobudur.

Potensi wisata religi di Jateng juga cukup banyak, seperti wisata ziarah Islam ada Wali Songo di Demak, Kudus, ziarah umat Kristen Goa Maria di Ambarawa, ziarah Hindu di Dieng dan Karanganyar serta Candi Ceto, di Ungaran untuk Kong Hu Cu diantaranya Sam Po Kong yang terkenal dengan hadirnya Laksamana Cheng Ho 600 tahun yang lalu.

Tim Kunker Spesifik Komisi X terdiri 12 orang yakni Ketua Tim Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) dengan anggota Isma Yatin dan Esti Wijayati (F-PDIP), Achmad Mujib Rohmat dan Bambang Sutrisno (F-PG), Sutan Adil Hindra, Ida Bagus Putu Sukarta dan Moreno Soeprapto (F-Gerindra), Laila Istiana (F-PAN), Krisna Mukti (F-PKB) Anas Thahir (FPP) dan Yayuk Sri Rahayuningsih (F-Nasdem). (MP), FOTO : MASTUR PRANTONO/PARLE/HR.

BULETIN PARLEMENTARIA

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH: Dr.

Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH: Dra. Damayanti, MSi (Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI: Irfan, S.Sos, MMSI (Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: M. Ibnu Khalid; Iwan Armanias; Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos; Ketut Sumerta, S. IP

ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos; Supriyanto;

Agung Sulistiono, SH; Rahayu Setiowati; Muhammad Husen;

Sofyan Effendi

REDAKTUR FOTO: Eka Hindra

FOTOGRAFER: Rizka Arinindya; Naefuroji; M. Andri

Nurdriansyah; Yaserto Denus Saptoadji; Andi Muhamad; Jaka Nugraha

SIRKULASI: Abdul Kodir, SH

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.III Gedung Nusantara

II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp.

(021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.

pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita

KETUA DPR APRESIASI KAPOLRES BOGOR



Ketua DPR RI Setya Novanto dan Kapolres Bogor beserta jajarannya

Kerja keras Kapolres Kabupaten Bogor Suyudi Ario Seto diapresiasi Ketua DPR RI Setya Novanto dalam mengamankan areal tambang milik PT. Antam di kawasan Gunung Pongkor, Bogor. Dari sebelumnya penuh konflik dan kerusakan lingkungan, kini jadi lebih kondusif dan ramah lingkungan.

Apresiasi itu disampaikan Novanto saat berkunjung ke kawasan tambang PT. Antam di Bogor, Selasa (20/10). "Saya apresiasi Kapolres yang sudah mengamankan areal pertambangan di sini. Apresiasi juga saya sampaikan kepada pihak TNI, Pemda, dan DPRD Kabupaten Bogor. Mereka bersama-sama dengan kepala desa dan camat mengendalikan lingkungan untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat di sini," tutur Novanto.

Dulu, sambung Novanto, kawasan pertambangan milik PT. Antam disusupi oleh para petambang liar. Akibatnya banyak kerusakan lingkungan dan sosial. Kerusakan lingkungan

yang dimaksud adalah bahaya longsor dan pencemaran sungai yang membahayakan kesehatan warga setempat. Sementara kerusakan sosial adalah menjamurnya prostitusi di lokasi tambang ilegal dan peredaran narkoba.

Kerusuhan sosial pun sempat terjadi pada 1998 di lokasi Antam, karena warga setempat dan para petambang liar ingin mempertahankan lokasi tambang emasnya. Banyak korban jiwa berjatuh. Kini, secara perlahan Pemda, DPRD, dan Polres setempat bersatu padu mengamankan lokasi tambang milik negara yang dikelola oleh PT. Antam.

"Kerugian negara selama 21 tahun mencapai Rp21 triliun. Para petambang liar membawa tong isinya 400 or lalu dicampur sianida dan mercury, sehingga menghasilkan 2 ton emas. Bila per gramnya Rp400 ribu, jadi 1 hari menghasilkan Rp890 juta. Ada 149 ton berarti kalau dikali 1 tahun hampir Rp1 triliun" ungkap Novanto, seraya menambahkan, "Kerugian listrik negara dari aktivitas tambang ilegal juga cukup besar."

Ditambahkan Novanto, apa yang sudah dilakukan Pemda Kabupaten Bogor bersama Polres, TNI, dan DPRD bisa menjadi model yang bagus bagi daerah lain dalam menangani konflik pertambangan dengan masyarakat. Seperti diketahui di daerah lain yang memiliki kekayaan sumber tambang selalu memancing gesekan antara masyarakat dan pemerintah setempat.

Dengan semakin kondusifnya lingkungan pertambangan di Gunung Pongkor, Bogor, PT. Antam juga bisa berbagi royalti kepada Pemda setempat sekaligus menjalankan program *corporate social responsibility* (CSR). Semua program sosial ini ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. (MH),

FOTO : DENUS/PARLE/HR.

PT. ANTAM BOGOR KIAN KONDUSIF

Sebagai objek vital negara, PT. Aneka Tambang (Antam) yang beroperasi di Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor, kian kondusif. Perusahaan pertambangan yang mengeksplorasi emas ini terus memperhatikan kesehatan lingkungan dan mengurangi gesekan sosial dengan warga setempat.

Ketua DPR RI Setya Novanto saat berkunjung langsung ke pusat pertambangan unit bisnis emas Antam di Gunung Pongkor, Selasa (20/10), mengapresiasi kerja keras Kapolres Bogor AKBP Suyudi Ario Seto yang telah mengamankan kawasan pertambangan ini dari kerusakan lingkungan dan kerusuhan sosial. Menurut keterangan Suyudi, pada 1998 di kawasan ini sempat terjadi pengrusakan areal tambang dan kantor milik Antam.

Pada 2012-2013 juga sering terjadi pencurian tambang emas milik Antam oleh para petambang ilegal. Suyudi mengungkapkan, pencurian emas sepanjang tahun tersebut mencapai 1,6 ton atau sekitar Rp801 miliar kerugian negara dari aksi pertambangan ilegal di kawasan Antam. Ketua DPR Setya Novanto bahkan berkesempatan meninjau lokasi



Ketua DPR RI Setya Novanto menebar benih ikan di sungai Ciguha

tambang ilegal yang di Desa Ciguha, Kecamatan Nanggung, Bogor.

Ada SD Negeri Ciguha yang berdiri dekat areal pertambangan milik Antam dan pertambangan ilegal. Para siswa SD ini menyambut dengan ceria kehadiran Novanto dan rombongan. Hadir pula Anggota Komisi IV Robert Yopi Kardinal (F-PG). Selain Kapolres, Novanto juga didampingi Ketua DPRD, Komisaris Utama Antam Fachrul Razi, dan Dirut Antam Tedy

Badrujaman.

Setelah 20 tahun beroperasi, kata Kapolres, Antam mulai kondusif. Aktivitas eksplorasi juga berjalan lancar. Bahkan, kawasan pertambangan kelak akan dijadikan pula sebagai kawasan wisata edukasi. Untuk mengembalikan pelestarian lingkungan di kawasan tambang emas ini, Novanto bersama Kapolres, Dirut, dan Komisaris Utama Antam menebar benih ikan tawes, gurame, mujair, dan ikan emas di Sungai Ciguha.

Menebar benih ikan ini penting untuk mengembalikan

ekosistem sungai yang dahulu tercemar oleh limbah merkuri dari para petambang ilegal. Kelak sungai ini bisa berfungsi menghidupi warga setempat dengan aliran airnya yang kembali sehat dan ikan air tawar yang beraneka ragam. Setelah menebar ikan, Novanto juga berkesempatan menanam pohon ransamala di areal pertambangan yang memang dikelilingi hutan. Lingkungan pun kian asri dengan penghijauan. (MH),

FOTO: DENUS/PARLE/HR.

Solidaritas Internasional Harus Jadi Garda Terdepan Atasi Kemanusiaan

Indonesia bukanlah negara pihak dari konvensi pengungsi, sehingga melihat fenomena yang terjadi dalam konteks migrasi tidak teratur. Namun demikian, Indonesia telah menerima banyak imigran, sebagian besar dari mereka mencari status sebagai pengungsi. Per Agustus 2015, sebanyak 13.110 persons of concern dan pencari suaka berada di Indonesia (data UNHCR).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat berpidato dalam Sidang Parlemen Dunia/133rd Inter-Parliamentary Union di Jenewa, Swiss, Senin (18/10/2015).

“Kami tidak memiliki tanggung jawab apapun kepada para pengungsi ini, bila merujuk pada konvensi yang ada. Kendati demikian, sejarah peperangan yang ada dan nilai-nilai solidaritas yang kami miliki mengajarkan bahwa kemanusiaan merupakan tanggung jawab bersama tanpa harus langsung terlibat dalam sebuah konvensi,” ungkap Fadli Zon.

“Di Aceh, Indonesia, kami menyediakan perlindungan bagi para pengungsi Rohingya yang telah melewati perjalanan berbahaya, lari dari konflik dan tak memiliki kewarganegaraan. Lebih dari 1.300 warga Rohingya yang diselamatkan oleh masyarakat lokal Aceh. Di Medan, kami merawat dengan baik mereka,” ungkapnya.

Ia mendukung langkah dalam menganggap migrasi internasional sebagai realitas multidimensi yang berkaitan dengan perkembangan di negara asal, transit dan tujuan.

“Kami sangat memahami tantangan-tantangan yang dapat timbul ketika kita membuka tangan kita menyambut migrasi ireguler ini. Perangkat hukum dan langkah-langkah cermat perlu diterapkan secara komprehensif untuk mengatasi



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berpidato di Sidang IPU Jenewa, Swiss

tantangan-tantangan tersebut,” terang Pimpinan DPR dari Fraksi Gerindra ini.

Solidaritas internasional harus menjadi garda terdepan dalam situasi kemanusiaan seperti ini. “Kami telah bersepakat, bersama Malaysia, untuk merawat para pengungsi Rohingya dengan menyediakan permukiman sementara di sejumlah wilayah,” terangnya.

Komunitas internasional perlu bekerja kolektif untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak berhak meninggalkan masalah yang ada hanya kepada satu negara semata. (SKR)/

FOTO: DOC/PARLE/IW.

FADLI ZON AJAK NEGARA-NEGARA DI DUNIA AKHIRI PERANG

Wakil Ketua DPR Fadli Zon RI sekaligus Ketua Delegasi DPR RI menyampaikan pidato dalam sidang Parlemen Dunia/133rd Inter-Parliamentary Union di Jenewa, Swiss, Senin (19/10/2015). Dalam pidatonya Fadli Zon mengajak semua negara untuk mengakhiri perang yang masih terjadi di beberapa negara.

Fadli Zon juga menyoroti soal pengungsi yang lari dari perang dan konflik di berbagai belahan dunia seperti Timur

Tengah, Afrika, hingga Asia Tenggara. Gelombang pengungsi telah memicu tantangan dan dampak sosial, serta identitas nasional negara asal pengungsi maupun negara penerima. Untuk itu, ia menegaskan dibutuhkan kesepakatan yang disetujui negara dunia untuk mengatasi gelombang pengungsi.

“Indonesia mendesak negara konvensi untuk secara penuh mengintegrasikan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dalam mengatasi pengungsi,” ungkap Fadli Zon.



Ketua Delegasi Parlemen Indonesia Fadli Zon di depan Sidang IPU

Walaupun bukan negara pihak konvensi pengungsi, Indonesia telah membuktikan komitmennya dalam menangani pengungsi. Komisioner PBB untuk pengungsi (UNHCR) mencatat per Agustus 2015, Indonesia menerima 13.110 pengungsi

dan pencari suka.

“Sejarah peperangan dan nilai solidaritas yang kami miliki mengajarkan bahwa kemanusiaan ada tanpa sebab apapun. Karena itu, kami menerima dan memperlakukan pengungsi dengan baik. Di Aceh, kami menyediakan perlindungan bagi lebih dari 1.300 warga Rohingya” ungkapinya.

“Kami mengajak solidaritas internasional untuk bekerja kolektif menyelesaikan masalah pengungsi” tegas Fadli Zon.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti soal pengungsi Palestina yang hidup di kamp pengungsi Suriah. Dia mendesak perlunya dilakukan langkah-langkah internasional yang baru untuk menghentikan perang dan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia.

“Untuk menyelesaikan perang dan konflik, Dewan Keamanan PBB harus menjadi wadah yang memegang teguh nilai-nilai dan prinsip piagam PBB. Rasa kemanusiaan sejatinya memanggil kita untuk mengakhiri beragam peperangan dan konflik” tutup Fadli Zon. (SKR)/FOTO:DOC/PARLE/IW.

WAKIL KETUA DPR AGUS HERMANTO TERIMA MASYARAKAT MIMIKA, PAPUA

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menerima aspirasi masyarakat Kabupaten Mimika Provinsi Papua yang tergabung dalam Komite Pencari Kerja Bersatu (KPKB), terkait masalah ketidakadilan di bidang ketenagakerjaan, kesejahteraan, dan hukum.

Menurut KPKB, masalah tersebut belum sesuai dengan dengan tujuan pembangunan nasional, yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Jadikan Mimika sejahtera, bebas pengangguran menuju kemakmuran rakyat Indonesia berdasarkan pembangunan nasional,” kata Ketua KPKB Frengky Kambu, Senin (19/10/2015), di Ruang Tamu Pimpinan DPR RI, Jakarta.

Agus Hermanto menyampaikan apresiasi terhadap aduan yang disampaikan masyarakat Mimika, dan berjanji akan menindaklanjuti sesuai proses perundang-undangan yang berlaku. Supaya yang diinginkan ada sambung rasa, juga akan disampaikan kepada anggota Dewan asal daerah pemilihan Papua ataupun pada pihak-pihak yang terkait.

“Dengan rasa tanggung jawab sebagai Pimpinan DPR, akan kami proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait yang menangani masalah ini,” ungkap Agus.

Sebelumnya, Agus Hermanto juga menyampaikan sudah sangat lama keberpihakannya terhadap Papua. Ia sudah berulang kali ke Papua dan sangat fokus terhadap keberadaan PT.Freeport Indonesia (PT.FI) di Mimika Papua. “Saya sudah melihat penambangan yang dilakukan PT. Freeport Indonesia, saya melihat perut bumi Indonesia diambil oleh investor asing dan diolah begitu saja,” tuturnya.

Untuk itu, Agus menyampaikan protes keras pada waktu itu, namun saat itu belum ada UU yang melandasinya. “Sekarang ini sudah ada UU tentang Minerba sehingga investor tidak bisa mengirimkan konsentrat begitu saja keluar negeri, harus mengalami pemurnian (smelter),” tandasnya.



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menerima aspirasi masyarakat Kabupaten Mimika, Papua

Dia mengetahui *tailling*, pengeboran, konsentrat, hingga mempelajari kontrak-kontrak yang ada di sana, sehingga pada saat pertemuan terakhir dengan pihak PT.FI disampaikan bahwa kalau PT FI masih mengeksplor konsentrat maka melanggar UU Minerba. “PT. Freeport Indonesia FI segera harus membangun *smelter*,” pungkasnya.

Kemudian, mengutip alasan dari PT.FI telah membangun smelter tapi di Gresik, dan itu mendapatkan perdebatan keras. Yang disebut investor mendirikan sesuatu harus memberikan manfaat bagi tempat yang ada di situ. Hingga dia memaksakan harus membangun *smelter* di Timika. Di mulut tambang itu harus ada *smelter* dan harus ada di Papua.

Pada waktu itu, pihak FI memberikan keterangan jika membangun *smelter* di Papua, akan mengalami selain kesulitan dana, juga infrastrukturnya belum siap. Selanjutnya Agus menyampaikan kepada Gubernur Papua Lucas Enembe, yang disanggupi untuk menyiapkan infrastruktur, seperti tanah yang akan disiapkan pemerintah daerah. Intinya pemba-

ngunan *smelter* harus di Papua supaya memberikan dampak positif bagi rakyat setempat.

Selain itu, juga Agus juga meminta pengolahan *tailing* yang menjadi limbah bisa dimanfaatkan menjadi bahan bangunan, sehingga juga dapat memberikan kefaedahan bagi masyarakat Papua.

Sekarang ini, sedang dibicarakan masalah kontrak yang menurutnya dibicarakan nanti, karena kontrak habis pada Tahun 2021. Jadi paling cepat pada tahun 2019 baru bisa

membicarakan kontrak. “Sekarang ini sudah membicarakan kontrak padahal yang ada di Freeport tidak dijalankan,” tegasnya.

Pihaknya juga sudah ada mengadakan pembicaraan dengan Menteri Perhubungan, bahwa bandara disana dikuasai oleh PT. FI. “Saya ingin memperjuangkan bandara itu juga menjadi aset daerah yang ada di sana sehingga bisa dimanfaatkan secara luas,” imbuhnya. (ASI)/FOTO: DENUS/PARLE/IW.

FADLI ZON PIMPINAN DELEGASI DPR KE SIDANG IPU KE- 133 DI JENEWA, SWISS

Wakil Ketua DPR Fadli Zon Minggu (18/10) bertolak ke Jenewa, Swiss memimpin Delegasi DPR RI untuk menghadiri Sidang 133-rd Inter-Parliamentary Union (IPU)/Sidang Parlemen Dunia.

Menurut Pimpinan DPR dari Fraksi Gerindra, sidang membicarakan berbagai agenda, satu diantaranya isu mengenai pengungsi dan migrasi tenaga kerja.

Dia melihat, pengungsi maupun pencari perlindungan merupakan masalah bersama. Tanpa bermaksud mencampuri urusan dalam negeri negara asal pengungsi, namun Parlemen Dunia harus ikut memikirkan penanganan arus pengungsi yang semakin besar.

Indonesia telah menunjukkan komitmennya. Bisa dilihat bagaimana Indonesia menerima dan memperlakukan dengan baik para pengungsi dari Rohingya.

“DPR RI mendorong negara di dunia agar menghapus pandangan negatif terhadap pengungsi,” kata Fadli Zon.

Dalam hal migrasi tenaga kerja, Fadli Zon menilai perlu adanya kerjasama dan dialog antara negara pengirim dan negara penerima agar dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh, terutama meningkatkan pembangunan tidak saja di negara asal tetapi juga di negara penerima.

“DPR RI akan memainkan peran penting dalam pemajuan kebijakan migrasi yang fair dan efektif, sehingga dapat meng-

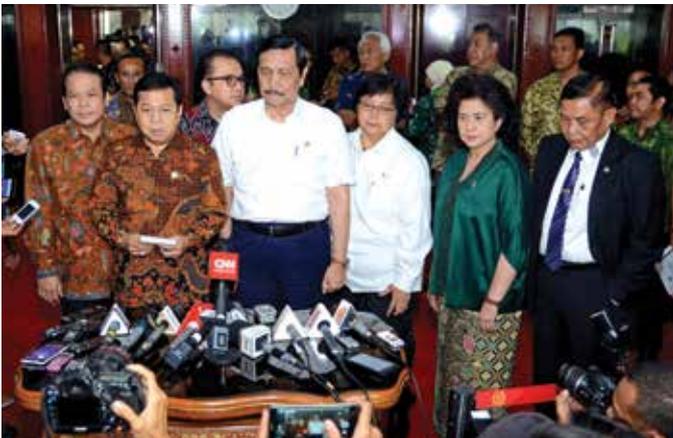


Suasana Sidang IPU di Jenewa, Swiss

hasilkan migrasi yang positif dan bisa menyikapi tantangan yang dihadapi negara penerima maupun negara asal, serta tantangan yang dihadapi migran itu sendiri,” ujarnya.

“Kita juga mendorong adanya mekanisme kerja sama internasional untuk memberikan informasi pasar kerja yang mudah diakses, transparan, dan adil, serta saling menguntungkan antar negara,” imbuh Fadli Zon. (SKRI)/FOTO: DOC/PARLE/IW.

KETUA DPR TERIMA MENKOPOLHUKAM BAHAS BENCANA ASAP



Pimpinan DPR RI bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja

Bencana asap yang belum reda dan kini meluas di Kalimantan dan Sumatera jadi topik pembahasan serius antara DPR dan Pemerintah. Saat ini memang belum ada tim yang dibentuk khusus secara nasional untuk menanggulangi bencana asap.

Diawali *coffee morning* di ruang kerja Ketua DPR RI, Jumat (16/10), pertemuan berlangsung hangat dan santai. Usai *coffee morning*, pertemuan langsung mengarah pada skema pemerintah dalam menanggulangi kabut asap yang masih masif terjadi. Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan membahas peta bencana dan rencana penanggulangan asap dalam pertemuan tertutup.

Hadir dalam pertemuan tersebut Menkes Nila Moeloek dan Menhut LH Siti Nurbaya. Dari DPR hadir pula Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman, Ketua Komisi I Muhfud Siddiq, Wakil

Ketua Komisi I Tantowi Yahya, Wakil Ketua Komisi VII Satya Yudha, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin. Pimpinan DPR juga ikut hadir, yaitu Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto.

Saat coffee morning itu, Ketua DPR Setya Novanto menghubungi langsung warga Palembang yang terkena bencana asap lewat sambungan telepon. Difasilitasi Novanto, seorang ibu bahkan bisa berbincang langsung dengan tiga menteri

sekaligus yang mengeluhkan bencana asap di kotanya.

Anak-anak banyak yang menderita ISPA. Menkes menyarankan agar tetap berada di dalam rumah bila tak ada keperluan mendesak. Udara di Palembang dikabarkan kembali memburuk. Asap mulai pekat kembali hingga jarak pandang hanya sekitar 200 meter saja. (MH)/FOTO:JAKA/PARLE/IW.

PIMPINAN DPR RAPAT KONSULTASI DENGAN SEJUMLAH MENTERI

Pimpinan DPR melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri untuk membahas masalah-masalah yang saat ini tengah disorot berbagai kalangan, khususnya masalah kabut asap yang hingga kini belum terselesaikan.

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, DPR mengundang Menteri Polhukam Luhut Panjaitan dan beberapa menteri, untuk meminta penjelasan terkait dengan kabut asap yang masih menyelimuti beberapa daerah.

“DPR menanyakan kepada Menkopolhukam, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kabut asap ini, karena dampak dari kabut asap ini sangat terasa bagi masyarakat, selain itu dari segi kesehatan. Dampak sosial juga sangat dirasakan masyarakat, kabut asap ini juga sudah mulai merambah ke daerah lain. Untuk itu Pimpinan DPR meminta penjelasan Menkopolhukam terkait kabut asap,” jelas Setya Novanto, di Gedung DPR Jumat (16/10/2015).

Setya Novanto menuturkan, kerugian juga dialami oleh para pengusaha yang memiliki lahan di kawasan tersebut.

“Adanya kabut asap ini tentunya harus dievaluasi dan dianalisa terutama dampak bagi perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah tersebut,” kata Novanto. Pimpinan juga me-



Ketua DPR RI Setya Novanto memimpin Rapat Konsultasi dengan sejumlah menteri

ngundang Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kesehatan, serta Pimpinan Komisi yang terkait dengan masalah ini.

Sementara bantuan dari beberapa negara tetangga, juga sangat membantu untuk menanggulangi masalah asap ini.

“Memang bantuan dari beberapa negara tetangga kepada Indonesia untuk mengatasi masalah asap ini sudah maksimal, tentu DPR sangat berterima kasih dan menghargai atas bantuan tersebut,” tegas Politisi Partai Golkar ini.

Masalah kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan, hingga saat ini masih belum bisa dipadamkan. Segala upaya dari pemerintah dan juga bantuan dari sejumlah negara, diharapkan dapat mengatasi masalah kabut asap ini. (AS) FOTO:JAKA/PARLE/HR

DPR Setuju RUU Penyandang Disabilitas Jadi RUU Usul Inisiatif DPR

Rapat Paripurna DPR menyetujui Rancangan Undang-undang Penyandang Disabilitas menjadi RUU Usul Inisiatif DPR. Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Selasa (20/10/15), dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Sebelum persetujuan diambil, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan fraksinya dalam bentuk tertulis kepada Pimpinan Rapat. Agus pun mempertanyakan kepada seluruh peserta rapat yang hadir.



Pimpinan DPR RI memimpin Rapat Paripurna

“Apakah RUU Usul Inisiatif DPR Komisi VIII DPR tentang Penyandang Disabilitas dapat disetujui menjadi usul inisiatif DPR?” tanya Agus. Jawaban “Setuju” pun dilontarkan oleh seluruh peserta rapat yang hadir.

Dalam laporan tertulisnya, Wakil Ketua Komisi VIII, Ledia Hanifah Amaliah (F-PKS), yang sekaligus Ketua Panitia RUU tentang Penyandang Disabilitas,

menyebutkan, bahwa usulan RUU tentang Penyandang Disabilitas ini untuk mengganti UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Ledia menyebutkan, pergantian ini diperlukan karena UU No 4 Tahun 1997 tersebut berparadigma pelayanan dan belas kasihan (charity based), sedang RUU tentang Penyandang Disabilitas berparadigma pemenuhan hak pe-

nyandang disabilitas, baik hak ekonomi, politik, sosial maupun budaya.

RUU ini diharapkan benar-benar dapat menjadi landasan hukum yang kuat, dan memastikan negara akan memenuhi kewajibannya dalam rangka pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. (SF)/FOTO:JAKA/PARLE/IW.



Pimpinan DPR RI menerima pandangan fraksi Partai Golkar dari anggota DPR, Ichsan Firdaus

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, menjadi usul inisiatif DPR. Seluruh fraksi menyetujui RUU ini untuk dilanjutkan pembahasannya bersama Pemerintah.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Ichsan Firdaus, menyampaikan bahwa RUU ini harus mendorong peran Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengelola sarana dan prasarana kepentingan nelayan, pembudidaya ikan serta penambak garam. Hal ini sebagai upaya mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Fraksi Partai Golkar DPR mendorong perlunya meningkatkan kapasitas usaha serta daya saing nelayan dan pembudidaya ikan di Indonesia, serta kemudahan akses untuk memperoleh permodalan dari perbankan ataupun perusahaan kredit lainnya, melalui penjaminan dari perusahaan penjamin,” Ichsan Firdaus, dalam pandangan fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna, (20/10/2015), di Gedung DPR, Jakarta.

Menurutnya, DPR juga mendorong untuk memberikan

RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan Jadi Inisiatif DPR

perlindungan terhadap lingkungan perairan yang menjadi sumber mata pencaharian para nelayan dan pembudidaya ikan serta petambak garam.

“Perlindungan terhadap pencemaran lingkungan perairan, serta memberikan sanksi yang tegas secara ekonomis maupun ekologis kepada para pelaku pencemaran,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, mengingat luas lautan yang mencapai 3,25 juta Km persegi atau 63% dari wilayah Indonesia.

Anggota dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Arzeti Bilbina berpandangan, sudah saatnya sektor perikanan menjadi urat nadi kedaulatan pangan. Visi poros maritim maupun target kedaulatan pangan yang berbasis pada sumber daya kelautan seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan pelakunya yaitu nelayan.

Kendati peningkatan produksi terus digulirkan pemerintah, namun demikian target produksi dan konsumsi ikan, dinilai belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan nelayan.

RUU ini diharapkan akan menjadi langkah transformasi yang penting bagi peningkatan kesejahteraan nelayan sebagai salah satu pilar dan prasyarat mutlak untuk mewujudkan mimpi tentang poros maritim dunia. Pemberdayaan dan perlindungan nelayan juga merupakan faktor penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia.

“Negara harus hadir untuk melindungi dan memberdayakan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam,” tegas Arzeti. (AS), FOTO : ANDRI/PARLE/HR.

POLITIKUS PDI-P IDHAM SAMAWI DILANTIK SEBAGAI ANGGOTA DPR

Politikus PDI Perjuangan dan juga Mantan Bupati Bantul Drs. H.M. Idham Samawi resmi dilantik sebagai Ang-

gota DPR RI untuk sisa masa jabatan 2014-2019 dalam Rapat Paripurna DPR ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang

2015-2016, Selasa (20/10/2015).

Idham Samawi pernah menjabat sebagai Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2 periode, 1999 - 2004 dan 2005 - 2010.

Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang Agus Hermanto didampingi Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Fahri Hamzah memandu pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPR RI

periode 2014-2019 tersebut.

Idham Samawi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia M. Hatta Ali dihadapan Rapat Paripurna DPR.

Sesuai dengan ketentuan pasal 77 UU No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU No.42 tahun 2014 serta pasal 8 ayat 2 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, mengatur anggota Dewan sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna DPR RI.

“Atas nama Pimpinan dan anggota Dewan menyampaikan selamat atas pelantikan Anggota Dewan tersebut dan berharap untuk segera bergabung dengan para Anggota Dewan lainnya guna melaksanakan tugas-tugas ke-



Pimpinan DPR RI melantik anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Idham Samawi

depan yang cukup padat,” ungkap Agus Hermanto dengan berharap semoga dapat menjalankan tugas dan ama-

nah sebagai anggota Dewan dengan sebaik-baiknya. (SKRI), FOTO : ANDRI/PARLE/HR.

LIMA CALON ANGGOTA KY DISAHKAN RAPAT PARIPURNA DPR



Pimpinan DPR RI usai mengesahkan lima calon anggota Komisi Yudisial (KY)

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Agus Hermanto Selasa (20/10) secara aklamasi mengesahkan lima calon anggota Komisi Yudisial (KY) yang telah melalui seleksi uji kelayakan (fit and proper test) Komisi III DPR.

Menurut Ketua Komisi III Azis Syamsuddin yang melapor-

kan uji kelayakan terdapat 7 nama calon anggota KY periode 2015-2020, Komisi hanya menetapkan lima orang Calon Anggota dan dua calon ditolak.

Kelima nama calon anggota KY yang lolos adalah, Joko Sasmito dan Maradaman Harahap mewakili unsur mantan hakim, Farid Wajdi dan Sumartoyo mewakili unsur Pratisi Hukum, serta Sukma Violetta mewakili unsur anggota masyarakat. Sedangkan dua nama yang ditolak adalah Harjono dan Wiwiek Awiati.

Komisi III DPR menghargai dan menyadari bahwa dari tujuh orang Calon Anggota Komisi Yudisial yang diajukan Presiden ini merupakan orang-orang terbaik yang dianggap mampu untuk duduk sebagai anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Akhirnya Komisi III DPR berharap, anggota Komisi Yudisial yang telah mendapat persetujuan Dewan dapat menjadi Komisioner yang mampu menjalankan wewenang sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. (SPY,MP), FOTO : IWAN ARMANIAS/PARLE/HR.

ARWANI TOMAFI TERPILIH SEBAGAI KETUA PANSUS RUU MINOL

Politisi PPP Mohammad Arwani Tomafi terpilih dan disahkan sebagai Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) dalam rapat perdana Pansus yang dipimpin Wakil Ketua DPR

Agus Hermanto, Kamis (22/10) di ruang Rapat Pansus B, Senayan, Jakarta.

Arwani Tomafi didampingi tiga wakil yakni I Gusti Agung Ray Wirajaya (Fraksi PDI Perjuangan), Lily Asdjudi-



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengesahkan Mohammad Arwani Tomafi sebagai Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol)

reja (FPG) dan Aryo P.S. Hadikusumo dari Fraksi Partai Gerindra. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat meski melewati dua kali loby karena adanya usulan memasukkan nama anggota wanita dalam unsur Pimpinan Pansus RUU Minol. Tetapi akhirnya sepakat menarik usulan tersebut dan diputuskan keempat nama tersebut sebagai Pimpinan Pansus RUU Minol.

Seusai penetapan, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyerahkan palu kepada Pimpinan Pansus Minol terpilih dan mempersilahkan menggelar rapat pertama. Pada kesempatan itu, Ketua Pansus Arwani Tomafi yang didampingi tiga wakilnya mengatakan, pembahasan RUU Minol adalah kerja bersama untuk memenuhi target kebutuhan legislasi yang telah diputuskan Prolegnas seba-

gai RUU Prioritas 2015.

Dia berharap Pansus segera membahas tahapan dan jadwal serta agenda kerja sehingga bisa segera dibahas bersama untuk bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya akan digelar rapat Pimpinan Pansus disusul rapat intern untuk menyusun agenda dan kegiatan bersama. (MP), FOTO : RISK A ARININDYA/PARLE/HR.

Panja BPJS Dalam Persoalan PBI di Sumbar

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan Panitia Kerja – Panja BPJS Kesehatan yang dibentuk Komisi IX DPR adalah jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang anggarannya disiapkan oleh negara. Pemerintah dan BPJS sejauh ini belum mampu menunjukkan data yang transparan berdasarkan nama dan alamat penerima. Kondisi ini juga menjadi temuan dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Barat.

“Ada 1.533.173 orang penerima PBI di Sumbar, saya tanya kira-kira berapa ribu lagi kartu yang tidak sampai ke tangan *by name by address*? Ini tidak terjawab kemudian saya balik pertanyaannya berapa yang sudah menerima manfaat sebagai peserta PBI, itupun mereka tidak bisa menjawab, artinya data PBI masih amburadul. Kalau begitu upaya menanggulangi masyarakat miskin tidak memenuhi sasaran,” kata anggota Panja BPJS Marwan Dasopan usai pertemuan di Padang, Sumbar, Rabu (21/10/15).

Ia kemudian mengkritisi ketika Menteri Kesehatan kemudian menyampaikan permintaan kepada Komisi IX agar menyetujui peningkatan jumlah penerima PBI menjadi 94,2 juta untuk seluruh Indonesia. Bagi Polisi Fraksi Kebangkitan Bangsa ini, permintaan tersebut sulit dipenuhi.

“Kami mengajak pemerintah dan BPJS agar merapikan data dan sistem yang ada terlebih dahulu sebelum membicarakan permintaan Menkes tersebut. Angka PBI sekarang 86 juta saja belum *clear* bagaimana mau ditambah menjadi 94,2 juta. Kami mau asal angka 86 juta disampaikan *by name* dan *by address*,” tekan dia.

Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat ini Tim



Panja BPJS Komisi IX DPR saat meninjau RS Jiwa HB Saanin di Kota Padang, Sumbar

Panja BPJS mendengar masukan dari jajaran Dinas Kesehatan di Sumbar, pimpinan rumah sakit negeri dan swasta serta perwakilan kepala puskesmas.

Tim Kunker juga berkesempatan meninjau RS Jiwa HB Saanin di Kota Padang dan berdialog dengan sejumlah pasien peserta PBI. “Kita lihat manajemen RS Saanin cukup baik, bersih, kelihatanlah mereka bekerja. Permintaan mereka untuk mendukung penyediaan alkes agar dapat mempercepat upaya penyembuhan tentu patut kita pertimbangkan,” kata anggota panja Aliyah Mustika Ilham dari FPD. (IKY), FOTO : IBNU R KHALID/PARLE/HR.



Anggota Pansus Angket Pelindo II, T. Taufiqulhadi

PANSUS ANGKET PELINDO II MULAI PANGGIL PIHAK-PIHAK TERKAIT

Setelah disahkan pada sidang paripurna, untuk pertama kalinya Panitia Khusus (pansus) Angket Pelindo II melakukan rapat, Senin (19/10). Dalam rapat tertutup tersebut disepakati untuk membangun pemahaman yang sama para anggota dari lintas fraksi agar memudahkan penggalan infor-

masi yang dibutuhkan untuk mengetahui fakta yang terjadi pada masalah di Pelindo II.

Menurut anggota Pansus Angket Pelindo II dari Fraksi NasDem, T. Taufiqulhadi, Selasa (20/10), di gedung DPR RI, Pansus Pelindo akan memanggil perwakilan SP JICT dan Komjen (Pol)

Budi Waseso. Dilanjutkan dengan sejumlah pihak yang sudah ditetapkan oleh Pansus untuk dimintai keterangan di kesempatan berikutnya.

Sebelumnya Taufiq mengatakan bahwa Pansus telah melakukan rapat untuk menyatukan aspirasi dan pandangan terkait rencana penyelidikan DPR terhadap masalah di Pelindo II. Pansus yang anggotanya terdiri dari beragam fraksi menyampaikan fokus perhatian masing-masing terhadap masalah Pelindo II.

“Pansus ini kan terbentuk dari lintas fraksi, lintas komisi yang memiliki beragam persepsi yang berbeda. Sehingga persamaan sikap menjadi suatu hal yang penting terlebih dahulu kami akukan dalam menyikapi kasus Pelindo II, sebelum bergerak lebih jauh,” ujar Taufiq.

Menurut dia langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pansus adalah mencari sebanyak-banyak data serta informasi terkait kasus tersebut. Dengan cara memanggil berbagai kalangan mulai dari *expert* di bidang pelabuhan hingga bidang hukum pidana. Termasuk juga akan memanggil regulator,

Kementerian Perhubungan dan BUMN, serta pihak terkait yaitu Pelindo II dan Kepolisian RI.

Harapannya dengan pemanggilan ini, Pansus bisa mendapatkan penjelasan lengkap bagaimana bentuk dari kontrak yang selama ini dilakukan oleh PT. Pelindo II sebagai wakil Indonesia dengan negara lain. Juga terkait di dalamnya persoalan dugaan penyelewengan dan korupsi yang dalam beberapa waktu belakangan ini dituduhkan kepada Direktur Pelindo II.

“Bagaimana bentuk kontraknya dengan pihak negara lain, apakah kontrak itu sudah sesuai atau malah sebaliknya menganggangi nasionalisme karena kepentingan negara lain malah lebih unggul di dalam kontrak tersebut,” jelas anggota Komisi III DPR ini.

Taufiq menjelaskan bahwa Pansus tidak ingin gegabah dalam memutuskan sikap dan mengambil langkah lanjutan yang diperlukan terhadap penyelesaian kasus Pelindo II. Untuk itu data dan informasi yang selengkap-lengkapnya dibutuhkan oleh anggota pansus.

Taufiq menjelaskan bahwa tujuan pansus tidaklah untuk menysasar kepa-

da satu personal saja. Melainkan kerja dari Pansus ini adalah untuk menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum dalam kasus tersebut.

Dia mengatakan bahwa sangat tidak mendasar jika ada sebagian kalangan mengkhawatirkan bahwa Pansus hanya ditujukan untuk menysasar orang atau pihak tertentu. Justru nantinya hasil dari Pansus Pelindo II ini akan dijadikan rekomendasi sebagai jawaban atas pandangan sumir publik dalam memandang kasus Pelindo ini.

“Artinya sikap kita tegas, jika memang di sana ada penyalahgunaan wewenang atau adanya persoalan hukum maka akan kami sebutkan begitu sebaliknya jika tidak ada tentu kami juga akan jelaskan kepada publik. Agar kasus ini tidak masuk angin,” tegasnya.

Taufiq menyampaikan bahwa dia siap untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Dia menyatakan siap secara objektif mengawal pansus ini dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang ingin membajak Pansus untuk kepentingan sesaat.

(AS), FOTO : ANDRI NURDIANSYAH/PARLE/HR.

BANGSA INDONESIA MASIH PERLU KADER PAMONG PRAJA



Anggota Komisi II DPR RI Amirul Tamim

Anggota Komisi II DPR RI Amirul Tamim, mengatakan bangsa Indonesia memerlukan kader-kader pamong Praja, karena dalam Struktur Pemerintahan Indonesia terdapat pemerintahan desa, kelurahan, dan kecamatan. Oleh sebab itu, diperlukan aparat-aparat

yang paham tentang kepomongprajaan.

“Bukan berarti mengabaikan kader-kader yang melalui pembinaan perguruan tinggi lain, tetapi fakta pengalaman bahwa kader-kader kepomongprajaan diperlukan, sehingga eksistensi pendidikan seperti IPDN ini perlu tetap dipertahankan,” kata Amirul, usai Komisi II menerima audiensi Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Rabu (21/10/2015), di Gedung DPR, Jakarta

Pola pembinaan IPDN juga harus mengikuti dinamika kehidupan pemerintahan, berbangsa dan bernegara, di masa yang akan datang dalam konteks nasional maupun global. Sehingga kurikulumnya diharapkan bisa mengikuti dinamika masa depan itu bagi pendidikan kader-kader kepomongprajaan itu.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini, melihat bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai induk pembinaan IPDN, tetap memberikan ruang

dan perhatian. Menurutnya Kebijakan pemerintah dengan beberapa komitmen-komitmen, untuk memperkuat pembangunan IPDN selain di Jatininggor, seperti di Sulawesi Utara, Riau, dan juga diperlukan Sabang Aceh, Papua, dan Kalimantan.

“Ini merupakan bagian untuk menyiapkan kader-kader yang bisa memenuhi kebutuhan Pamong Praja di tingkat pemerintah daerah,” ungkapnya.

Dari awal, DPR memberikan perhatian yang besar, dan telah meninjau IPDN di beberapa tempat. Amirul melihat antara jumlah taruna yang ada di dalam kampus itu belum seimbang dengan daya dukung fasilitas yang ada. Termasuk dengan lokasi IPDN yang ada di Riau, yang dianggap terlalu jauh, sehingga ada beberapa daerah yang juga ingin mengambil bagian menyiapkan beberapa fasilitas, seperti tanah. Sudah beberapa daerah menyiapkan itu untuk pembangunan kepomongprajaan.

“Harapan ke depan, pola pembinaan perlu ditingkatkan, dan ada beberapa yang perlu dievaluasi kembali, beberapa muatan-muatan pendidikan harus ditambahkan. Katakanlah wajib bahasa Inggris dan penggunaan IT. Itu harus

menjadi mata pelajaran yang harus diperkuat,” tuturnya.

Dosen Fakultas Politik dan Pemerintahan IPDN Nurliah Nuridin, menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu pendidikan aktual taruna IPDN. “Hal ini karena mereka (lulusan IPDN) akan bertugas di seluruh wilayah provinsi. Kalau mereka hanya belajar teori kan hambar,” jelasnya.

Taruna yang hadir adalah Praja terbaik dengan nilai terbaik di setiap kontingen, Awardnya mereka bisa melihat apa saja di Jakarta, ini yang menjadi pendidikan bagi mereka nantinya.

“Kebetulan mata kuliahnya adalah pemodelan kebijakan, mereka sedang belajar formulasi kebijakan, otonomi daerah, dan perwakilan. DPR dan Komisi II adalah bagian dari mitra kerja

mereka juga nantinya,” tutur Nurliah Nuridin.

Pertanyaan yang mengemuka, antara lain terkait pembangunan daerah-daerah tertinggal, netralitas birokrasi, penanganan asap, dan banyak hal sehingga diharapkan bisa menambah ilmu dan pengalaman. (ASI, FOTO : RIZKA/PARLE/HR).

KOMISI VI SETUJUI ANGGARAN TAHUN 2016 KEMENTERIAN BUMN

Komisi VI DPR menyetujui usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 345 miliar untuk RAPBN 2016. Rapat persetujuan ini pun berlangsung cepat, dan hanya ada satu catatan kecil menyertainya, yakni agar anggaran Kementerian BUMN lebih ditekankan terhadap program pembinaan BUMN.

“Komisi VI dapat menyetujui alokasi pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2016 sesuai surat Menkeu No. S-814/MK.02/2015 tanggal 16 Oktober 2015, dan sesuai Surat Banggar No. AG/15679:DPR tanggal 19 Oktober 2016 perihal penyampaian hasil pembahasan RAPBN 2016 senilai Rp 345 miliar,” kata Ketua Komisi VI DPR, Hafidz Tohir (F-



Ketua Komisi VI DPR RI, Hafidz Tohir

PAN), saat rapat kerja dengan Menteri BUMN, Rini Soemarno di Gedung Nusantara I, Selasa (20/10/15).

Politikus asal dapil Sumsel ini memastikan, hasil ini selanjutnya akan disampaikan kembali ke Badan Anggaran, sesuai mekanisme dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menanggapi persetujuan ini, Menteri BUMN, Rini Soemarno mengaku, pihaknya sama sekali tidak mengajukan perubahan anggaran untuk RKA KL. Kementerian BUMN masih mengacu pada usulan program sebelumnya yakni untuk dukungan manajemen senilai Rp 165,85 miliar dan program pembinaan BUMN senilai Rp 179,14 miliar.

“Kami tidak mengalami perubahan pagu anggaran sebesar Rp 345 miliar,” jelasnya. (SF), FOTO : ANDRI NURDIANSYAH/PARLE/HR.

PEMBATASAN HAJI BERI PELUANG PADA MASYARAKAT

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifah Amalia mengatakan pengaturan keberangkatan jamaah yang sudah berhaji merupakan upaya dalam memberi kesempatan kepada yang belum pernah berhaji. Mengingat kuota haji yang terbatas.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. MK berpandangan bahwa melakukan ibadah haji lebih dari sekali tidak melanggar konstitusi.

“Pada dasarnya pengaturan keberangkatan jamaah yang sudah berhaji merupakan upaya memberi kesempatan kepada yang belum pernah berhaji, karena sebagaimana diketahui bersama, kuota haji kita terbatas. Dalam hal pengelolaan dana keuangan haji, dengan diundangkannya UU No.34 tahun 2014 menunjukkan keseriusan kita untuk memperbaiki sistem keuangan dan upaya keras untuk memenuhi hak jamaah,” jelas Ledia Hanifah.

Sayangnya, lanjut Ledia, amanat undang-undang dimana



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifah Amalia

BPKH (badan pengelola keuangan haji) yang sejatinya harus sudah berdiri pada 2014 lalu tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Pemerintah belum menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang menjadi turunan Undang-undang.

Senada dengan Ledia, anggota Komisi VIII Abdul Fikri Faqih menambahkan bahwa dalam melaksanakan ibadah haji tidak hanya bersandar kepada Undang-undang dasar dan Undang-undang lainnya yang ada di negeri ini. Namun juga berdasarkan pemahaman (fiqih) syaria'ah Islam seperti yang tertuang

dalam Qur'an dan Hadits. Bila tidak demikian ibadahnya bisa tidak diterima, karena menghambat orang lain yang mau melaksanakan kewajibannya.

"Pembatasan Ini agar pemerintah bisa secara adil memberi peluang kepada seluruh masyarakat melakukan kewajiban ibadahnya. Tidak dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Dengan demikian terkait keputusan MK tersebut, maka saya berharap agar ke depan tidak hanya mengedepankan prinsip kebebasan (hak), namun juga mengedepankan prinsip keadilan. (AYU) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/OD

MESKI RESES, KOMISI III AKAN TETAP BAHAS RUU KUHP

Ketua Komisi III Azis Syamsuddin mengatakan, meski dalam masa reses tetap akan membahas RUU KUHP dan sudah mendapat izin dari Pimpinan Dewan untuk tetap melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Ia menegaskan hal itu pada pembukaan seminar mengenai RUU tentang KUHP di gedung Pustakaloka Nusantara IV DPR Selasa (20/10) malam. Dalam seminar ini diundang semua mitra kerja Komisi III DPR.

"Ada 14 mitra kerja yang dipastikan diundang tanpa kecuali. Yaitu mitra kerja yang terkait dengan bidang kerja masalah penegakan hukum," tegas Azis.

Untuk itu dia meminta kepada semua pihak bisa bekerja sama dengan baik bagi kepentingan pembaharuan hukum



Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin

pidana ini. "Meski masa reses, pembahasan akan tetap dilakukan. Komisi III hanya mengambil hari-hari libur besar saja setelah itu akan dimulai pembahasan kembali," jelas Azis.

Ditargetkan, pembahasan RUU KUHP akan selesai bulan Agustus 2016 sudah masuk dalam Rapat Paripurna. "Mudah-mudahan dapat dukungan dari masyarakat," tutur dia.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini menjelaskan, dalam menindaklanjuti pembahasan RUU KUHP tersebut sudah diagendakan melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM pada hari Kamis 22 Oktober. Namun tiba-tiba dari Kementerian Hukum dan HAM membatalkan, maka rapat diundur dan akan diselenggarakan pada hari Senin (26/10).

Seminar KUHP ini bertujuan untuk menampung aspirasi dari seluruh elemen, mitra kerja dan juga seluruh masukan yang ada pada masyarakat. Komisi III DPR melakukan hal ini secara komprehensif dengan persiapan yang maksimal diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. (SPY, MP), FOTO : NAEFURODJI/PARLE/HR.

BOROBUDUR JANGAN KALAH DENGAN BALI

Anggota Komisi X DPR Yayuk Sri Rahayuningsih meminta apa yang dikeluhkan stake holder (pemangku kepentingan) obyek wisata Candi Borobudur perlunya kerja sama meningkatkan infrastruktur bisa direalisasikan Pemprov Jawa Tengah. Termasuk peningkatan kualitas Bandara Ahmad Yani Semarang sebagai salah satu pintu gerbang masuknya wisatawan ke Jawa Tengah.

Ketika melakukan kunjungan kerja spesifik dan berdialog dengan pejabat Provinsi Jateng dan Pemkab Magelang serta Asita dan PHRI baru-baru ini di

Borobudur, Yayuk lebih jauh mengatakan, Kemenpar dalam APBN- P 2015 dapat pagu anggaran Rp 2,472 triliun dan RAPBN 2016 mendapatkan alokasi pagu sementara Rp 5,643 triliun berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 3,17 T.

Peningkatan anggaran tersebut kata Yayuk, akan dimanfaatkan untuk melakukan promosi secara besar-besaran baik untuk wisatawan mancanegara maupun wisatawan dalam negeri atau nusantara (wisnus). Khusus untuk Candi Borobudur yang merupakan warisan dunia ini harus diusahakan betul-betul



Anggota Komisi X DPR RI Yayuk Sri Rahayuningsih

jangan sampai kalah dengan Bali.

“Jangan kalah dengan Bali. Bali warisan nasional atau warisan Indonesia, sementara Borobudur adalah warisan dunia,” tegasnya.

Selain itu, dia menyatakan beberapa *stake holder* yang menangani Zona I Borobudur serta Zona II dan III tidak menonjolkan ego sentris masing-masing. Bisa digabung antara Asita, PHRI dan pemangku kepentingan lain untuk

sama-sama meningkatkan kunjungan turis ke Borobudur.

Meski lokasi tempat tinggalnya tidak jauh, Yayuk yang juga Ketua Tim Kunspek Komisi X Abdul Kharis sama-sama dari Dapil Jateng, namun baru sekali ke Borobudur ketika siswa SD. “Jadi potensi wisnus sendiri masih sangat besar, terutama anak-anak sekolah perlu dikenalkan bahwa ada keajaiban dunia-Borobudur,” tegas Yayuk.

Sementara Kemenpar yang men-canangkan beberapa promosi Borobudur di luar negeri diharapkan lebih gencar lagi karena popularitasnya menurun, padahal seharusnya kita bangga. “Bandingkan dengan Bali, setiap kuil di Bali bisa jadi obyek, tapi ini yang sudah ada di depan mata, tidak ditangani dengan serius,” tekan dia. (MPI), FOTO : MASTUR PRANTONO/PARLE/HR.

KOMISI VIII DESAK KEMENAG SEGERA DIRIKAN BPKH DAN BPJPH



Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh P. Daulay

Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama untuk segera mempercepat

pendirian BPKH (badan pengelola keuangan haji) dan BPJPH (badan penyelenggara jaminan produk halal). Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin beserta seluruh jajarannya, Senin (19/10).

“Sesuai amanat Undang-undang, kedua badan itu semestinya sudah harus berdiri pada bulan Oktober 2016, namun sayangnya sampai saat ini kedua badan itu belum diperhatikan dengan maksimal oleh Kementerian agama,” ungkap Ketua Komisi VIII, Saleh P. Daulay.

Saleh memandang, kedua badan itu sejatinya tidak hanya terkait dengan keyakinan dan ibadah. Namun juga menjadi salah satu jawaban atas masalah ekonomi umat. Oleh karena itu pihaknya berharap agar pemerintah,

dalam hal ini Kemenag segera mendirikan kedua badan tersebut.

Selain itu, terkait dengan permasalahan haji yang terus terjadi, Komisi VIII mendesak pemerintah melakukan upaya diplomatik guna meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji mendatang. Saleh menilai upaya diplomatik ini sebagai bagian dari kunci sukses penyelenggaraan ibadah haji yang terletak pada pihak Otoritas Saudi.

“Selama ini, posisi diplomatik Indonesia pada Saudi masih sangat lemah dibandingkan negara-negara lain. Saya bersama teman-teman di Komisi delapan ini meyakini upaya diplomatik akan dapat meningkatkan pelayanan serta perlindungan bagi para jamaah haji selama berada di tanah suci,” jelas Politisi dari Fraksi PAN ini. (AYU), FOTO : NAEFURODJIE/PARLE/HR.

BAKTI SOSIAL PIA, KUNJUNGI BANGSAL ANAK RSCM

Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI kembali menjalankan kegiatan sosial, mengunjungi bangsal anak, ruang bedah anak dan ruang Talasemia anak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Selasa (20/10).

“Sebagai makhluk sosial yang juga



Ketua Umum PIA DPR RI, Deisty A. Novanto didampingi anggota PIA saat mengunjungi bangsal anak RSCM

membutuhkan orang lain, maka kami merasa sudah seharusnya untuk peduli dan saling berbagi terhadap sesama. Atas dasar itulah maka hari ini kami, PIA DPR RI mengunjungi ruang anak, ruang bedah anak, dan ruang Thalasemia di RSCM. Mungkin bantuan kami tidak seberapa, namun kami berharap dapat menghibur anak-anak yang tengah menderita berbagai macam penyakit,” ungkap Ketua PIA Fraksi PAN, Yotty Mulfachri Harahap.

Lebih lanjut, Yotty berharap agar tidak ada lagi pasien miskin yang mengalami penolakan oleh RSCM dan rumah sakit lainnya. Pasalnya, tidak sedikit kasus penolakan rumah sakit terjadi pada pasien-pasien yang tergolong keluarga miskin.

Senada dengan Yotty, Ketua Umum PIA DPR RI, Deisty A. Novanto menambahkan bahwa apa yang dilakukannya bersama rekan-rekan sejawatnya ini merupakan program bulanan PIA yang sudah disusun sebelumnya. Ia berharap kedatangannya bersama anggota PIA lainnya dapat menjadi spirit atau dorongan kepada anak-anak yang tengah menderita sakit, serta keluarga pasien. Selain memberikan sejumlah bantuan, PIA juga sengaja mendatangkan pendongeng, pemain sulap dan balon-balon untuk menghibur pasien.

Sementara itu, Direktur Medik dan Keperawatan RSCM, Ratna Dwi Restuti menyambut baik dan mengapresiasi kedatangan anggota PIA. Menurutnya, kegiatan yang mulia ini merupakan yang

pertama kali dilakukan PIA ke bangsal anak RSCM. Ia melihat keceriaan anak-anak yang tengah menderita berbagai macam penyakit saat kedatangan PIA. Hal itu dapat menjadi “obat” yang akan menjadi penyemangat para pasien untuk kuat menjalani cobaan dan dapat sembuh dari penyakitnya.

“Di bagian anak ini, sekitar delapan puluh persen lebih pasien orang kurang mampu yang menggunakan BPJS. Tidak hanya dari Jakarta dan sekitarnya, namun juga seluruh wilayah di Indonesia. Insya Allah secara bertahap pasien anak di bangsal ini akan dipindahkan ke gedung Kiara yang lebih luas dan lebih *homey*, sehingga anak merasa di rumah sendiri,” pungkas Ratna. (AYU FOTO:RV/PARLE/RAY)

DPR GUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI WUJUDKAN PARLEMEN MODERN

DPR RI berkomitmen mewujudkan Parlemen Modern, dengan terus mendorong transformasi dan reformasi kelembagaan. Deputi bidang Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Damayanti mengatakan reformasi kelembagaan ini didasarkan pada prinsip terwujudnya transparansi, penggunaan teknologi informasi dan reformasi representasi rakyat.

Penggunaan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan DPR RI sebagai parlemen modern juga diperlukan dalam melakukan aksi kehumasan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dikenal dengan sebutan *electronic public relation* atau e-PR.

“Hal ini guna memperoleh kepercayaan kerjasama dan dukungan masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Nanti ada Kepala Sub-Bagian (Kasubbag) website dan medsos,” kata Damayanti, saat membuka *workshop* kehumasan DPR RI. Selasa (20/10/2015), di Gedung DPR RI.

Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Pasal 68, DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dalam kedudukan DPR sebagai lembaga negara ini, menurut Damayanti, diperlukan sebuah kondisi yang kondusif dalam upaya dapat memaksimalkan kerja DPR itu sendiri, di dalam melaksanakan 3 fungsi Dewan.

Kehumasan dalam instansi pemerintah merupakan segecap tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi dalam usaha membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan membina martabat instansi dalam pandangan masyarakat.

Khusus untuk Kehumasan Parlemen, dia menjelaskan, kehumasan ini mungkin berbeda dengan kehumasan lainnya. Secara garis besar humas pemerintah bertugas menyampaikan kebijakan sekaligus menyerap reaksi yang ditimbulkan masyarakat sehubungan dengan kebijakan yang telah ditetapkan.



Deputi Persidangan dan KSAP, Damayanti, didampingi Karo Humas dan Pemberitaan dan Karo Pimpinan DPR RI

Sama hanya dengan humas pemerintah lainnya, fungsi Humas Parlemen adalah untuk mengatur lalu lintas sirkulasi informasi, baik internal maupun eksternal dengan memberikan informasi serta penjelasan seluas mungkin kepada publik, mengenai apa yang telah ditelurkan, mengenai kebijakan-kebijakan atau apapun yang sudah dilakukan oleh DPR itu sendiri.

Sehingga segala kebijakan, dan kegiatan yang dilakukan itu bisa diterima oleh publik, dan kita memperoleh *support*. Kalau kebijakan itu sudah diterima oleh masyarakat, otomatis kinerja dewan itu akan lebih diterima dan akan lebih bisa diakui kinerjanya.

“Kita ingin sekali mamaksimalkan itu semua, semaksimal mungkin kita mensupport anggota. Saya mengharapkan *workshop* kehumasan ini dapat memberikan transparansi dan representasi kepada masyarakat seperti yang diharapkan,” katanya.

Patut diketahui, kehumasan DPR sebenarnya berbeda

dengan kehumasan lainnya, karena DPR ini merupakan lembaga politik, dimana semua kekuatan politik saling tarik menarik sehingga disitu berbagai isu dapat tiba-tiba hadir dan menjadi krisis kehumasan.

Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Djaka D. Winarko, mengatakan *workshop* sebagai hal strategis untuk terus menerus berkesinambungan mengelola *public relation* bersama Setjen DPR. “Melalui kegiatan ini diharapkan tercip-

tanya reputasi citra yang baik lembaga ini kepada publik. Dengan demikian diharapkan adanya kepercayaan dan kedekatan antara lembaga dengan publik,” imbuh Djaka. (AS), FOTO : AGUNG SULISTIONO/PARLE/HR.

Komisi I Minta Pemerintah Segera Keluarkan Kebijakan Satelit



Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq

Komisi I menginginkan pemerintah segera mengambil kebijakan tentang satelit dan kebutuhan satelit untuk sektor pemerintahan dan pertahanan. Indonesia punya Satelit Garuda 1, namun keluar orbit dan tidak berfungsi.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menjelaskan, sejak tahun 2012 sudah ada pembicaraan yang cukup intens antara Komisi I DPR dengan Pemerintah. Hal ini agar Pemerintah punya Satelit tersendiri, yang digunakan untuk keperluan pemerintahan, dan yang sangat diprioritaskan untuk sektor pertahanan serta keamanan. Namun sampai akhir pemerintahan belum ada keputusan politik apapun.

“Sekarang Komisi I coba mengangkat

masalah ini lagi, sudah ada pembicaraan serta langkah-langkah awal dari pemerintah, dalam hal ini melalui Kemeninfo dan Kemhan,” ungkap politisi PKS ini, usai Raker tertutup dengan Menteri Komunikasi dan Informasi, dan Sekretaris Kementerian Pertahanan, Senin (19/10/2015), di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta.

Terkait, Satelit Garuda I di orbit 1-2-3, yang sekarang sudah keluar dari orbit dan tidak berfungsi, Mahfudz menilai secara spesifikasi memang cocok, ditambah Garuda 1 juga menggunakan frekuensi L-band, adalah yang tepat kegunaannya untuk *mobile communication* yang biasanya digunakan untuk penerbangan, pelayaran, termasuk juga untuk militer. “Secara spesifikasi memang ini (Satelit Garuda 1) cocok,” katanya.

Selanjutnya, Mahfudz menerangkan bahwa pembicaraan terakhir terkait hal tersebut, yang disebut dengan *Operator Regular Meeting* (ORM), kalau Indonesia ingin memanfaatkan kembali frekuensi L-Band ini, diberi batas waktu sampai 7 Desember 2015. “Indonesia punya kontrak yang jelas untuk pengadaan satelitnya menggantikan Garuda 1 itu,” paparnya.

Ini dibicarakan antara Komisi I dengan Pemerintah, menurut Mah-

fudz, Pertama dalam jangka pendek, bagaimana solusi terkait dengan tenggat waktu yang diberikan ORM yang berkedudukan di London di bawah *International Telecommunication Union* (ITU). Apa solusinya, karena ini harus diambil cepat dan ada konsekuensi pembiayaan. Solusi jangka panjangnya adalah bagaimana rencana pengadaan Satelit itu sendiri, yang dikhususkan untuk kebutuhan pemerintahan.

“Jangka pendeknya adalah solusi untuk penyelamatan frekuensi L-Band. Kita (Komisi I) minta kepada Kemeninfo dan Kemhan untuk sama-sama mengambil langkah-langkah solusi. Hal ini juga harus berbicara dengan Presiden RI Joko Widodo, karena waktu yang sudah sangat mepet ini,” tegasnya.

Batas waktu sampai 7 Desember 2015, karena kalau ini tidak diambil keputusan segera, banyak pihak yang mengincar frekuensi itu dari operator-operator dari berbagai negara lain.

Dia juga menerangkan asumsi dana yang dibutuhkan, untuk pengadaan satelit baru yang sesuai dengan spesifikasi di orbit termasuk di frekuensi L-Band itu, dibutuhkan USD 500 juta. Ini angka yang besar, maka harus keputusan politik pemerintah untuk menyiapkan anggarannya. (AS), FOTO : JAKA/PARLE/HR.

DPR DUKUNG RENCANA KUWAIT BANGUN KILANG MINYAK DI INDONESIA

DPR RI akan memfasilitasi pemerintah Kuwait untuk kembali membicarakan rencana kerjasama pembangunan kilang minyak kepada pemerintah Indonesia. Hal tersebut terungkap saat Duta besar Kuwait untuk Indonesia, Nasser Bareg Shaher Al Enezi mengunjungi Pimpinan DPR RI, Kamis (22/10)

di ruang kerja Ketua DPR RI, Setya Novanto, Senayan Jakarta.

“Sebenarnya kedatangan Dubes Kuwait ke DPR RI ini untuk berpamitan karena pertengahan November mendatang ia akan pindah ke negara lain, dan posisinya digantikan oleh dubes baru. Namun pada kesempatan itu

Dubes juga mengutarakan beberapa pesan, salah satunya rencana kerjasama pembangunan kilang minyak antara Kuwait dan Indonesia yang sejak tahun 2007 belum juga terlaksana, padahal sudah ada MoU nya,” jelas Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang industri dan pembangunan, Agus Hermanto yang



Pimpinan DPR RI didampingi anggota Komisi I menerima Dubes Kuwait

ikut mendampingi Ketua DPR RI, Setya Novanto menerima kunjungan Dubes Kuwait.

Dilanjutkan Agus, ada kendala atau hambatan kenapa rencana tersebut belum juga terlaksana. Salah satunya belum ada satu kesepakatan terkait insentif, *tax allowance* yang diinginkan pemerintah Kuwait. Oleh karena itu Agus berjanji akan membicarakan hal ini kepada pemerintah melalui Komisi

terkait yang ada di DPR yakni, Komisi VII yang membidangi masalah minyak bumi, dan Komisi VI yang membidangi masalah industri. Tidak hanya itu, Ketua DPR RI, Setya Novanto dalam pertemuan tersebut juga berjanji akan mencoba membicarakan hal itu kepada Presiden Joko Widodo.

“Untuk investasi membangun kilang minyak memiliki margin yang tidak tinggi, sehingga tidak banyak inves-

tor yang berkeinginan di situ. Ketika Pemerintah Kuwait memiliki rencana tersebut di Indonesia, tentu hal itu harus didukung dan didorong. Karena hal ini akan member nilai tambah yang cukup tinggi, yakni tidak lagi Impor BBM yang sudah jadi, namun *crude oil* atau minyak mentah,” papar Agus.

Benefit lain yang juga didapat Indonesia dari rencana kerjasama pembangunan kilang minyak di Indonesia adalah bisa menyerap tenaga kerja Indonesia, yang artinya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Bahkan dilanjutkan Politisi dari Fraksi Parta Demokrat ini, cara ini juga akan menjadi sebuah solusi bagi Indonesia untuk tidak ketergantungan terhadap perusahaan kilang minyak di luar negeri.

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon yang ikut mendampingi pimpinan DPR RI menerima Dubes Kuwait, juga mengamini langkah yang akan diambil pimpinan DPR untuk mendorong pemerintah melanjutkan kerjasama tersebut. Meski demikian, Effendi juga berharap agar pemerintah Kuwait lebih aktif lagi untuk kembali membicarakan rencana tersebut kepada pemerintah.

(AYU)/FOTO:DENUS/PARLE/IW.

KOMISI I MINTA KOMITMEN PEMERINTAH DUKUNG MEF TNI

Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja khusus membahas dukungan pemerintah terhadap program Minimum Essential Force (Kekuatan Pokok Minimum) bagi TNI. Rapat menghadirkan Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI, Menteri Keuangan RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI.

“Dalam rapat kerja ini kita meminta komitmen pemerintah terutama dalam politik anggaran dalam hal ini Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Tanpa keberpihakan apapun yang diusulkan Kemenhan dan Panglima TNI tidak akan jadi prioritas,” kata Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais menjawab pertanyaan wartawan usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/15).

Ia menambahkan MEF merupakan proses modernisasi alat utama sistem pertahanan TNI yang telah dicanangkan pemerintah sejak 2007 lalu dan fokus pada tiga postur, kekuatan, penyebaran penempatan dan kemam-



Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais

puan. Seluruh fraksi dalam pertemuan tersebut menurutnya mendukung agar dukungan tersebut bisa diwujudkan pada penyusunan anggaran Kemhan/TNI pada TA 2016 dan seterusnya.

Bicara pada kesempatan yang sama

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menyebutkan pada tahun anggaran lalu TNI memperoleh Rp102 triliun dan hanya sekitar Rp30 triliun yang digunakan untuk kepentingan MEF. “Alasan pemerintah waktu itu tidak ada duitnya,” tutur dia.

Dalam rapat kerja tersebut sejumlah keputusan berhasil disepakati diantaranya mendesak pemerintah untuk segera membahas kembali kebijakan anggaran Renstra MEF TNI Tahap Kedua (tahun 2015-2019) sehingga menjadi dasar dalam penyusunan anggaran Kemhan/TNI.

Komisi I juga mendesak pemerintah untuk mengakselerasikan kebijakan dan pelaksanaan pinjaman luar negeri untuk pembiayaan Renstra MEF TNI tahun 2015-2019, termasuk proses periode berikutnya. “Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Renstra MEF TNI tahap kedua sebagai payung hukum pelaksanaan MEF,” demikian Mahfudz. (IKY), FOTO :

NAEFUODJIE/PARLE/HR.

MKD TEGUR SETYA NOVANTO DAN FADLI ZON

Rapat pleno Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon telah melakukan pelanggaran kode etik saat melakukan pertemuan dengan pengusaha yang juga calon kandidat Presiden AS Donald Trump. Keputusan diambil setelah melewati pembahasan dan perdebatan diantara anggota mahkamah, pada akhirnya semua sepakat dua pimpinan dewan ini melakukan pelanggaran kode etik ringan.

“Pembahasan boleh dibilang agak alot, tetapi akhirnya keputusan bisa mufakat MKD memberikan teguran. Semangatnya itu bagaimana anggota DPR terlebih pimpinan bisa arif dan bijaksana dalam melakukan tugas, memilih acara dan membuat pernyataan,” kata Ketua MKD Surahman Hidayat dalam konferensi pers usai sidang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/15).

Salah satu pernyataan yang menurut MKD termasuk pelanggaran ringan adalah pada saat Setya Novanto menjawab pertanyaan calon kandidat Presiden AS Donald Trump, apakah rakyat Indonesia mencintainya. Pada saat itu dijawab oleh Ketua DPR, “Yes highly.” Namun ia menolak menjelaskan lebih jauh. “Semua sudah ada di media kan,” tuturnya.

Surahman menambahkan dalam menindaklanjuti kasus ini sudah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk meminta keterangan kepada dua pimpinan pada Kamis (15/10). Menurutnya permintaan keterangan kepada Setya Novanto dan Fadli Zon dilakukan di ruang pertemuan Badan Kerja



Ketua MKD Surahman Hidayat

Sama Antar Parlemen.

“Iya kita memang memanggil pada hari ini, tetapi kita tidak kekeh-kekehan, kita fleksibel. Waktu pemeriksaan hadir 9 orang anggota MKD dua pimpinan berhalangan Pak Hardi tugas ke luar negeri dan Pak Junimart sedang *fit and proper* anggota KY di Komisi III,” jelas dia.

Pada bagian lain ia juga menjelaskan tentang dugaan penyimpangan anggaran dalam perjalanan ke Amerika Serikat tersebut. Hasilnya menurut politisi Fraksi PKS ini tidak ditemukan bukti adanya penggunaan anggaran diluar ketentuan (ilegal).

Dalam pleno putusan akhir MKD menurut wakil rakyat dari Jawa Barat X ini, seluruh anggota hadir kecuali satu anggota dari Fraksi PPP Zainut Tauhid Saadi meminta izin karena ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. (IKY), FOTO : NAEFUROD-JIE/PARLE/HR.

KEBERHASILAN KOMISI VIII DESAK KEMENAG BAYARKAN TPG



Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengapresiasi adanya tambahan anggaran untuk pembayaran TPG (Tunjangan Profesi Guru) Non-PNS di lingkungan Kementerian Agama

lewat SK inpassing dari realokasi anggaran di atas atau sebesar Rp.1.46 triliun.

“Saya mengapresiasi adanya tambahan anggaran Kemenag yang ditujukan untuk pembayaran TPG Non PNS, sebagaimana desakan komisi VIII akan tuntutan Ribuan guru honorer Madrasah di bawah naungan Kementerian Agama RI yang disampaikan langsung kepada DPR RI pada Senin (12/10) lalu di DPR RI. Mereka meminta kepastian kapan inpassing dan tunggakan tunjangan sertifikasi guru dibayarkan,” jelas Maman sesaat sebelum berlangsungnya rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama, Senin (19/10).

Dilanjutkan Politisi dari Fraksi PKB ini, saat itu pihaknya meminta Kemenag untuk merealokasi anggaran Badan Litbang dan Diklat Kemenag sebesar Rp30 milyar untuk pembayaran TPG.

Tidak hanya itu berdasarkan desakan Komisi VIII, Kemenag telah merealokasi anggaran SBSN (surat berharga syariah negara) sebesar 56% dari Ditjen PHU (Penyelenggaraan Haji Dan Umrah) untuk dialokasikan pada peningkatan Sarana dan prasarana PTAIN (perguruan tinggi agama islam negeri).

“SK Inpassing ini sekaligus menjawab desakan komisi VIII dan tuntutan ribuan guru madrasah akan kepastian pembayaran TPG yang terhutang. Selama ini guru di bawah Kemenag merasa dianaktirikan oleh Pemerintah. Namun dengan adanya SK ini sekaligus menjadi obat atas kekecewaan guru agama selama ini. Inilah buah dari perjuangan kami (komisi VIII) dan seluruh masyarakat khususnya guru agama,” pungkas Maman. (AYU), FOTO : DOK./PARLE/HR.

PENURUNAN ANGGARAN BEKRAF JANGAN GANGGU TARGET TAHUN 2016

Komisi X DPR RI mengingatkan, walaupun anggaran tahun 2016 untuk Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengalami penurunan, namun agar tidak mengganggu target yang telah disepakati. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR, Nuroji, usai RDP dengan Kepala Bekraf, Triawan Munaf.

“Masih cukup jauh memang anggarannya dari cluster yang harus ditangani. Namun kita lihat, dengan anggaran sebesar ini, bagaimana capaiannya. Komisi X DPR akan mendorong agar target dapat tercapai, dan akan kita evaluasi per tiga bulan,” kata Nuroji, di Gedung Nusantara I, Senin (19/10/15).

Sebagaimana diketahui, pagu anggaran sementara Bekraf semula sebesar Rp 1,157 triliun. Namun, klarifikasi dari Kementerian Keuangan menyebutkan, anggaran mengalami pengurangan sebesar Rp 43 miliar, sehingga Bekraf mendapat alokasi anggaran Rp 1,113 triliun untuk tahun mendatang.

“Namun Komisi X DPR mendorong Bekraf untuk mengusulkan kembali pada saat pembahasan RAPBN-P 2016

terkait penundaan Rp 43 miliar itu,” imbuh Nuroji.

Politikus F-Gerindra ini mengakui, tahun depan memang menjadi tahun pertama bagi Bekraf untuk menjalankan kinerjanya dengan optimal. Pasalnya, tahun ini Bekraf masih dalam tahap persiapan pembentukan lembaga. Sehingga, belum ada tolok ukur dalam mengukur kinerjanya. Namun, target tetap menjadi acuan yang harus dicapai.

“Tahun 2016 ini tahun pertama Bekraf bekerja secara optimal. Kita belum punya tolak ukur. Artinya, kita lihat hasilnya dengan anggaran yang ditetapkan sekarang. Walaupun sebenarnya anggarannya cukup realistis,” kata politikus asal dapil Jawa Barat ini.

Komisi X DPR dan Kepala Bekraf menyepakati beberapa target untuk tahun 2016, meliputi pertumbuhan PDB Ekraf sekurang-kurangnya sebesar 8,5 persen.

“Jumlah tenaga kerja ekraf sekurang-kurangnya sebesar 12,3 juta orang, dan kontribusi ekspor atau devisa bruto



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Nuroji

Ekraf sekurang-kurangnya sebesar 7,07 persen,” jelas Nuroji.

Terkait penurunan anggaran ini, Kepala Bekraf Triawan Munaf mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan kinerja dengan besaran anggaran yang ditetapkan. (SF), FOTO : JAKA NUGRAHA/PARLE/HR.

KOMISI X APRESIASI POTENSI WISATA RELIGI DI JAWA TIMUR

Komisi X DPR mengapresiasi potensi wisata religi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR, sekaligus Ketua Tim Kunjungan Spesifik, Nuroji, usai meninjau beberapa situs destinasi religi di Provinsi Jawa Timur, Jumat (16/10/15). Nuroji didampingi 12 Anggota Komisi X DPR lainnya.

“Wisata religi ini sangat luar biasa jumlah peziarah yang datang setiap harinya. Bahkan pada hari Sabtu dan Minggu bisa mencapai 8.000 orang. Tentu ini merupakan potensi yang luar biasa,” apresiasi Nuroji.

Namun, lanjut politikus F-Gerindra itu, pihaknya masih menemukan beberapa kendala dalam pengelolaan wisata religi ini. Yakni, masih dikelolanya destinasi religi itu oleh pihak keluarga.

“Kedepannya, harus ada kontribusi wisata religi terhadap pendapatan daerah, serta keterlibatan pemerintah dae-



Tim Kunspek Komisi X DPR mengunjungi situs destinasi religi di Jatim

rah dan masyarakat,” saran politikus asal dapil Jawa Barat ini.

Sebelum meninjau destinasi religi Tim Kunker Spesifik diterima Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Syaefullah Yusuf, Bupati Bangkalan, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Pimpinan dan Anggota DPRD Bangkalan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi

Jawa Timur, Pengurus Asita, BPPI serta tokoh agama/tokoh masyarakat dan pegiat pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan, Provinsi Jawa Timur memiliki kekayaan luar biasa dalam hal destinasi wisata religi, antara lain Makam Sunan Ampel di Surabaya, Makam Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim di Gresik,

Makam Sunan Drajat dan Makam Sendang Duwur di Lamongan.

“Kemudian, ada Makam Bung Karno di Blitar, Gereja Puh Sarang di Kediri, Pura Mandagiri di Lumajang, Makam Sunan Bonag di tuban dan Makam Waliyullah Syaichona Cholil di Bangkalan,” papar Wagub. (HR), FOTO : EKA HINDRA/PARLE/HR.

MARWAN CIK ASAN SAMBUT BAIK PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JILID EMPAT

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan menyambut baik Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 4 yang pekan lalu diluncurkan oleh Pemerintah. Marwan menilai kebijakan ini lebih memberikan kepastian, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Saya menyambut baik paket kebijakan ini, karena dirasa lebih konkrit, dan menyentuh sektor riil,” kata Marwan, ketika dikonfirmasi Parlemenaria via telepon, Senin (19/10/15).

Sebagaimana diketahui, Kamis pekan lalu, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 4. Dalam paket tersebut, kebijakan lebih difokuskan pada persoalan upah buruh, kredit usaha rakyat (KUR), hingga lembaga pembiayaan ekspor.

“Soal upah buruh, kita harapkan, dengan adanya formula tetap dari Presiden, bahwa upah adalah besaran upah ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ini bisa diterima oleh teman-teman buruh dan kalangan pengusaha. Sehingga tidak perlu terjadi ketegangan-ketegangan antara pengusaha dan buruh,” jelas Marwan.



Wakil Ketua Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan

Politikus F-Demokrat itu yakin, dengan aturan pengupahan ini, dapat memberikan kepastian kepada para pengusaha untuk dapat menghitung kepastian biaya untuk karyawannya. Di satu sisi, buruh juga memperoleh kepastian terkait kenaikan upah setiap tahunnya.

“Ini semakin memberi kepastian soal pengupahan buruh. Karena selama ini *negotiable*. Dengan formula yang pasti ini, buruh menjadi tahu kenaikan upah yang akan terima di tahun mendatang. Tinggal dilihat, apakah aturan ini bisa

soft landing atau tidak implementasinya di lapangan. Bisa diterima kedua belah pihak, berarti bagus,” papar Marwan.

Sementara terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), politikus asal dapil Lampung ini juga melihat hal yang positif. Dengan diperluasnya jangkauan KUR, diharapkan dapat menggairahkan sektor usaha. Pasalnya, masih banyak sektor yang membutuhkan KUR.

“Soal pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk perusahaan yang akan melakukan ekspor. Ini juga bagus,” nilai Marwan.

Pekan sebelumnya, Darmin Nasution menjelaskan, pemerintah memutuskan untuk menetapkan formula penentuan yang sederhana dan jelas untuk Upah Minimum Provinsi (UMP). Ini bertujuan agar terbuka lapangan kerja seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

“Jadi upah buruh tahun depan yang akan ditetapkan itu upah minimum sekarang ditambah persentase inflasi, ditambah pertumbuhan ekonomi,” kata Darmin, sembari memastikan, kenaikan upah tersebut dapat mulai diberlakukan tahun depan, bukan lima tahun.

(SF)/FOTO: JAKA/PARLE/IW.



Anggota Komisi XI DPR, Johnny G. Plate

KOMISI XI DPR MINTA BPJS PERBAIKI SISTEM

Komisi XI DPR menyetujui usulan perubahan cadangan pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp 1,54 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan 2015 menjadi pembiayaan. Namun sejumlah catatan menyertai persetujuan ini.

Komisi ekonomi ini meminta pemba-

hasan lebih lanjut melalui rapat dengan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan juga diminta untuk melakukan perbaikan sistem pengelolaan supaya tidak menimbulkan *moral hazard*.

Demikian beberapa kesimpulan hasil rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan dan Direktur Utama

BPJS Kesehatan, di Gedung Nusantara I, Kamis (15/10/15) malam. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR, Fadel Muhammad (F-PG) ini membahas Pengambilan keputusan Penerimaan Negara Penyertaan Modal Negera (PMN) tahun 2016 dan BMN sebagai Underlying Asset SBSN, dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-700/M.06/2015 tanggal 9 September 2015.

Anggota Komisi XI DPR, Johnny G. Plate membenarkan bahwa memang ada anggaran di APBN-P 2015 sebesar Rp 1,54 triliun yang dialokasikan untuk pembiayaan BPJS, diakibatkan karena BPJS Kesehatan mengalami *defisit cash flow*. Ia menegaskan agar BPJS Kesehatan untuk dapat segera memperbaiki sistemnya, agar pelayanan kepada masyarakat lebih meningkat.

“Banyak sekali permasalahan yang muncul di BPJS. Dimana rakyat yang seharusnya berhak untuk mendapatkan jaminan yang dibiayai oleh negara, malah tidak mendapatkannya. Banyak juga masalah *claim* yang tidak berimbang, sehingga banyak *claim invoice* dari rumah sakit harus diperiksa,” tegas Johnny.

Politikus F-Nasdem ini menegaskan, bahwa pembiayaan BPJS ini menggunakan uang negara, sehingga ia ingin

betul-betul pelayanan kesehatan ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dimana saat ini BPJS Kesehatan meng-cover 152 juta rakyat Indonesia. Berarti masih ada 100 juta rakyat yang belum ter-cover.

“Kami ingin, biaya yang dialokasikan dari APBN ini betul-betul dapat digunakan khususnya oleh masyarakat yang berhak mendapatkannya dari kaum-kaum marjinal. Kita ketahui dana BPJS tidak saja dari APBN, karena BPJS masih mempunyai dana lain, misalnya dari eks Askes. Kita ingin melihat keseluruhan bagaimana posisi *cash flow*, gabungan, atau konsolidasi, antara yang dari Askes dulu, atau yang saat ini dibiayai oleh negara,” papar Johnny.

Politikus asal dapil NTT itu juga mengingatkan, jika BPJS tidak segera memperbaiki sistem dan mengatur *cash flow* dana BPJS, itu akan mempengaruhi APBN. Namun tak dipungkiri, walaupun ada kekhawatiran ini dapat mempengaruhi APBN, namun pembiayaan ini harus tetap dilakukan, karena berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat yang dilindungi oleh UUD 1945.

“Jumlahnya memang tidak besar. Hingga kini ada defisit sebesar Rp 5,8 triliun. Dengan beralih fungsinya

cadangan menjadi PMN sebesar Rp 1,5 triliun, maka defisit menjadi Rp 4,3 triliun. Itu tidak besar jika dibandingkan dengan total APBN yang mencapai lebih dari Rp 2 ribu triliun. Akan tetapi ini terkait dengan 152 juta rakyat, sehingga kami merasa, BPJS penting untuk memperbaiki sistemnya,” kritisi politikus yang juga Anggota Banggar DPR itu.

Johnny menambahkan, pihaknya akan segera mengundang Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Direksi BPJS Kesehatan untuk melakukan rapat konsolidasi terkait hal ini. Rapat konsolidasi harus segera dilaksanakan, karena terkait dengan RAPBN 2016.

Raker ini juga menyetujui beberapa pembahasan, diantaranya, disetujuinya angka penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp 1.360,20 triliun. Kemudian penerimaan negara dari bea dan cukai sebesar Rp 186,52 triliun. Sementara untuk penerimaan PNB, disepakati sebesar Rp 273,80 triliun.

“Sehingga, total rencana pendapatan negara untuk tahun 2016 sebesar Rp 1.882,50 triliun,” kata Fadel, membacakan kesimpulan yang juga berisi persetujuan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada beberapa BUMN.

(SFI)/FOTO:JAKA/PARLE/IW.

KOMISI XI DPR SETUJUI PMN BEBERAPA BUMN

Komisi XI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII) disetujui mendapat PMN sebesar Rp 1 triliun. Untuk peningkatan ekspor, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) diberi PMN sebesar Rp 4 triliun.

Demikian kesimpulan yang dibacakan Ketua Komisi XI DPR, Fadel Muhammad, usai rapat dengan Menteri Keuangan, Bambang P.S Brodjonegoro, di ruang rapat Komisi XI DPR, Gedung Nusantara I, Kamis (15/10/15) malam.

“Komisi XI DPR juga menyetujui PMN kepada PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) sebesar Rp 1 triliun. Dengan catatan penggunaannya untuk perumahan sederhana. Untuk hal-hal yang belum dilakukan pada waktu terdahulu harus dikembalikan sesuai tujuan pendirian PT. SMF, yakni perumahan sederhana,” jelas Fadel.

Namun, lanjut Fadel, Komisi XI DPR belum dapat menyetujui usulan PMN untuk PT. Geodipa Indonesia sebesar Rp 660 miliar. Namun lebih setuju untuk dialihkan untuk PMN kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI). Semula, PT. SMI mengajukan Rp 3,5 triliun.

“PMN untuk PT SMI ditambah pengalihan dari PMN PT.



Suasana raker Komisi XI DPR dengan Menkeu

Geodipa Indonesia sebesar Rp 660 miliar, sehingga total PMN yang diterima PT. SMI menjadi sebesar Rp 4,160 triliun,” imbuh Fadel.

Politikus F-PG ini menambahkan, Komisi XI DPR menyetujui PMN kepada organisasi atau lembaga keuangan internasional, dengan total sebesar Rp 3,904 triliun. Dana itu disebarkan kepada 5 organisasi.

“Pertama, *Islamic Development Bank* (IDB) mendapat PMN sebesar Rp 80,1 miliar, *International Finance Corporation* sebesar Rp 0,2 miliar, dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) sebesar Rp 41,7 miliar,” papar Fadel.

Berikutnya, Rp 45,6 miliar untuk *International Develop-*

ment Association (IDA). Dan terakhir, *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) sebesar Rp 3,737 triliun.’

Sementara untuk pembahasan Barang Milik Negara (BMN) sebagai *underlying* aset penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, Komisi XI menyepakati, jumlah BUMN yang disetujui untuk digunakan sebagai aset SBSN senilai Rp 29,496 triliun untuk penerbitan SBSN tahun

2016.

“Sisa yang belum digunakan pada tahun 2016 dapat di-*carry over* untuk penerbitan SBSN pada tahun-tahun berikutnya. Dan untuk SBSN yang jatuh tempo, BMN yang telah digunakan sebagai aset SBSN dapat digunakan kembali untuk penerbitan berikutnya (*rool over*),” tutup politikus asal dapil Gorontalo itu. (ISFI/FOTO:JAKA/PARLE/IW.

KOMISI VII DESAK PEMERINTAH SEGERA LAKUKAN DIVESTASI SAHAM PT FI



Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika

Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera melakukan divestasi saham PT. Freeport Indonesia. Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Kardaya Warnika mengatakan pemerintah harus konsisten menjalankan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengamanatkan divestasi dengan maksud dan tujuan agar penguasaan nasional yaitu Indonesia semakin besar.

“Divestasi harus dilakukan, waktu dan mekanismenya harus sesuai dengan ketentuan, karena itu amanat dari per-

aturan perundangan dan kontrak, jangan diundur-undur,” kata Kardaya, disela Raker Komisi VII dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Senin (19/10/2015), di Gedung DPR RI.

Lebih lanjut, ia menjelaskan mekanisme dilakukannya divestasi ini harus sesuai dengan peraturan perundangan. Seandainya diputuskan bahwa divestasi itu melalui skema Initial Public Offering (IPO) di bursa saham, maka tidak sesuai dengan tujuan dari UU.

Menurut Kardaya, peraturan itu dibuat tujuannya untuk kepentingan negara, kalau keputusan perundangan tidak dilaksanakan maka artinya kita tidak melaksanakan perundangan itu.

“Divestasi tujuan untuk Indonesia, kalau IPO bebas dan orang asing boleh. Apakah itu sesuai dengan tujuannya? Semuanya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kalau tidak dilaksanakan akan ada dampak ketidakpastian hukum,” tegasnya.

Divestasi ini merupakan amanat dari peraturan perundangan dan kontrak, kalau melakukan divestasi artinya kita menjalankan ketentuan itu. “Divestasi tujuannya untuk Pemerintah. Kalau Pemerintah tidak mampu ada BUMN, tapi kalau IPOnya ke asing maka tujuan divestasi tidak akan terpenuhi,” tutur Kardaya. (ASI/FOTO:ANDRI/PARLE/HR

KOMISI VII DAN MENTERI ESDM SEPAKATI RKA 2016

Komisi VII DPR RI menyetujui Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tahun 2016, sebesar Rp7,807 triliun. Ketua Komisi VII Kardaya Warnika mengatakan jumlah ini telah terjadi pengurangan sebesar Rp1.086 Triliun, dari yang diusulkan Rp8,894 triliun.

“Ini yang bisa kita hasilkan dan merupakan hasil bersama Komisi VII dengan Menteri ESDM,” kata Kardaya, saat memimpin Raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said, Senin (19/10/2015), di Gedung DPR RI.

Menteri ESDM Sudirman Said, menyatakan pengembalian anggaran pendidikan akan masuk dalam catatan. Selanjutnya, meskipun Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah domain dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tapi dalam sektor energi, Kementerian ESDM mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan meyakinkan supaya program berjalan pada sektornya.

Sikap yang berkenaan dalam sektor ESDM, diputuskan untuk KL adalah Rp7,8 T, tapi kata Sudirman, sebetulnya secara sektor juga mengelola tambahan melalui Dana Alokasi



Suasana raker Komisi VII dengan Menteri ESDM Sudirman Said

Khusus (DAK) dan PMN, yang juga menjadi tanggung jawab untuk diawasi.

Disamping itu, Kementerian ESDM juga mempunyai kewajiban untuk melihat investasi yang dikerjakan oleh swasta

yang pada tahun ini direncanakan sebesar USD 45 miliar, dan tahun depan USD 51,9 miliar.

“Jadi mengurangi alokasi anggaran untuk KL sebetulnya

bukan merupakan refleksi dari keseluruhan tugas kami. Ada tugas-tugas lain yang juga kami kerjakan,” tuturnya. (AS)

FOTO:ANDRI/PARLE/HR

KOMISI VI SOROTI KERJA ITPC

Kerja *Indonesian Trade Promotion Centre* (ITPC) di luar negeri jadi sorotan Komisi VI DPR RI. Dari hasil tinjauan Komisi VI ke beberapa negara, ternyata kantor ITPC kerap tak ada. Ini membuat kampanye perdagangan Indonesia juga terbengkalai.

Dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Senin (19/10), hampir semua anggota Komisi VI yang hadir mempertanyakan eksistensi ITPC, terutama di Eropa yang ternyata kinerjanya tak maksimal. Dalam kunjungan kerja terakhir ke Jerman, Komisi VI DPR tak menemukan kantor ITPC. Ini sangat mengecewakan Komisi VI yang saat itu berkunjung. Padahal anggaran promosi dagang cukup besar.

“ITPC di Hamburg sangat mengece-

wakan, karena tidak ada kantornya. Begitu juga di Milan,” ungkap Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F-PKB). Anggota Komisi VI lainnya Melani Suharli menyatakan, ITPC di luar negeri sangat minim. Bagaimana Indonesia mau mensurvei produk-produk yang disukai di luar negeri, bila ITPC tidak bekerja optimal. Mestinya, Kemendag bisa menyewa lembaga survei untuk melihat produk komoditas yang disukai di suatu negara.

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Sartono Hutomo (F-PD). ITPC masih lemah dalam mempromosikan produk-produk Indonesia ke pasar global. Survei komoditi Indonesia untuk pasar global belum banyak dilakukan. Kopi, misalnya, tidak semua negara di Eropa menyukai satu jenis kopi. Jadi



Anggota Komisi VI DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz

hasil survei itu bisa menentukan jenis kopi apa yang disukai di suatu negara. Ini penting, agar Indonesia tetap memimpin pasar kopi yang kini sudah direbut Vietnam. (MHI)/FOTO:ANDRI/PARLE/IW.

FAHRI HAMZAH TEMUI MAHASISWA PENDEMO SOROTI KINERJA PRESIDEN



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menemui pendemo di halaman gedung DPR RI

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menemui para pendemo yang membawa bendera Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan GPII ini. Fahri lantas berorasi di depan demonstran, dari atas panggung truk.

Politisi PKS ini menyampaikan orasi dengan muatan tema pemakzulan (impeachment). Dia ingin agar para demonstran mahasiswa tidak memilih jalan pintas revolusi. Dia memberikan pesan kepada mahasiswa, bahwa ada sistem.

“Kita harus sabar dengan proses seperti ini. Tidak ada proses jalan pintas dalam demokrasi. Karena jalan pintas itu berda-

rah-darah, anda jangan mau!” kata Fahri, Selasa (20/10/2015), depan gerbang Gedung DPR RI, di hadapan mahasiswa.

Fahri mengapresiasi aksi mahasiswa. Dalam paparannya Pimpinan Dewan ini sempat mengenang aksinya di era 1998 dimana ia turut menjadi bagian yang menumbangkan pemerintahan saat itu.

“Saya bagian dari aktifis mahasiswa seperti teman-teman di tahun 98 di mana pemerintahan saat itu kejam. Namun yang kita hadapi sekarang bukanlah pemerintahan yang kejam, tapi pemerintahan yang lemah,” ujarnya.

Pansus-pansus di DPR, dikatakan Fahri, bisa menyelidiki apakah Presiden Jokowi bersalah atau tidak. Proses selanjutnya bisa ditempuh melewati jalur MK dan lintas sidang istimewa MPR.

Selanjutnya, Fahri menjelaskan pentingnya pemilu. Menurutnya kesalahan demokrasi adalah kadang-kadang yang dipilih bukan yang sejati, kadang-kadang yang palsu pun dipilih. Tapi tidak ada cara lain, dia menghimbau jangan serahkan kekuasaan kepada yang tidak mengerti kekuasaan, dan tidak pernah meminta mandat itu pada rakyat.

“Karena itu, anda harus hargaai pemilu. Jangan ada dari mahasiswa yang berfikir pemilu tidak penting. Pemilu ada proses meminta mandat dari rakyat, supaya orang itu bisa ditagih lagi oleh rakyat melalui aspirasi mahasiswa,” tuturnya. (AS), FOTO : AGUNG SULISTIONO/PARLE/HR.



Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR/Korinbang Agus Hermanto didampingi anggota Komisi I Effendi Simbolon menerima Dubes Kuwait (kiri) dan Dubes Peru (kanan) untuk Indonesia, Kamis (22/10)
Foto : Denus/Parle/HR



Rapat Kerja Komisi X DPR RI dipimpin Ketua Komisi Teuku Riefky Harsya dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya terkait RKA-KL 2016, Rabu (21/10) Foto : Jaka Nugraha/ Parle/HR



Suasana FGD RUU KUHP yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR dengan tema Pembaharuan Hukum Nasional, Selasa-Kamis (20-22/10) Foto : Naefuroji/ Parle/HR

